



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

MENGELOLA APBN UNTUK MENCAPAI TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2026

Fauzan Lazuardi Ramadhan
Analisis Legislatif Ahli Pertama
fauzan.ramadhan@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Momen pidato kenegaraan Presiden pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI menjadi momen penting bagi pembangunan Indonesia pada tahun mendatang. Pasalnya, pada momen tersebut, Presiden RI akan menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beserta nota keuangan. Sebelumnya, DPR RI bersama pemerintah telah membahas pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN (RAPBN) 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 serta menyepakati kisaran asumsi ekonomi makro dalam penyusunan RAPBN 2026.

Selain asumsi dasar makro, DPR RI dengan pemerintah juga menyepakati beberapa target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2026 seperti (i) pertumbuhan ekonomi 5,2—5,8 persen; (ii) tingkat kemiskinan 6,5—7,5 persen; (iii) tingkat pengangguran terbuka 4,44—4,96 persen; (iv) indeks rasio gini 0,377—0,380; (v) tingkat kemiskinan ekstrem 0—0,5 persen; (vi) indeks modal manusia 0,57; (vii) indeks kesejahteraan petani 0,7731; dan (viii) proporsi penciptaan lapangan kerja formal sebesar 37,95 persen.

Presiden RI, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa total alokasi untuk belanja negara tahun 2026 adalah sebesar Rp3.786,5 triliun dengan target penerimaan negara sebesar Rp3.147 triliun. Defisit RAPBN 2026 yang telah ditetapkan berada pada kisaran 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Melihat dari postur penerimaan dan proyeksi belanja negara, beban anggaran untuk tahun 2026 diperkirakan akan berat. Anggaran belanja negara sebagian besar dialokasikan untuk biaya rutin dan program-program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis, dan program lainnya dinilai belum mampu mendorong perputaran ekonomi di masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan efisiensi anggaran untuk tahun anggaran 2026 untuk digunakan pada kegiatan prioritas presiden. Namun, efisiensi anggaran ini dikhawatirkan akan mengganggu pencapaian target pemerintah. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurrahman, menyampaikan bahwa efisiensi anggaran yang menyeluruh dikhawatirkan menjadi kontraproduktif apabila mengabaikan fungsi stimulatif belanja negara terhadap perekonomian. Senada dengan hal tersebut, Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengatakan efisiensi sebaiknya diukur berdasarkan dampaknya terhadap pertumbuhan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan kemiskinan, bukan sekadar penghematan.

Tantangan makroekonomi mencakup perlambatan konsumsi rumah tangga, stagnasi investasi swasta, dan meningkatnya tekanan sosial akibat pemutusan hubungan kerja, serta melemahnya daya beli dikhawatirkan akan menjadi rintangan bagi pemerintah dalam mencapai target yang disepakati. Selain itu, penerimaan negara yang cenderung melambat juga dikhawatirkan akan menjadi penghambat bagi pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun strategi yang tepat agar target pembangunan yang telah disepakati dapat dicapai. Strategi yang dapat dilakukan antara lain, *pertama*, meningkatkan kerja sama pemerintah

dengan badan usaha dalam proyek pembangunan. Investasi dari swasta diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih ekspansif. *Kedua*, penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan minat investor melalui peraturan yang jelas, sederhana, dan konsisten. Penyederhanaan ini diharapkan akan memperkecil potensi hambatan masuknya pelaku usaha ke pasar, memperluas basis pelaku usaha, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Ketiga, pengalokasian anggaran untuk pos-pos strategis yang mampu memberikan efek berganda besar dan berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat serta pembangunan jangka panjang. *Keempat*, mempersiapkan peta jalan realokasi belanja berbasis produktivitas, agar penghematan anggaran diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan bukan penghambat pembangunan. Pada akhirnya, pengelolaan APBN yang lebih inklusif dan berkualitas diharapkan mampu menjadi daya ungkit bagi kesejahteraan masyarakat secara langsung dan berkelanjutan, sehingga menjadikan iklim yang positif bagi pencapaian target-target dari indikator pembangunan yang telah ditetapkan.

Atensi DPR

Ketua Banggar DPR RI menyampaikan proyeksi belanja negara tahun 2026 berada pada kisaran Rp3.800—Rp3.820 triliun dengan defisit 2,53 persen dari PDB. Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan anggaran APBN menjadi suatu hal yang penting dalam mencapai target pembangunan tahun 2026, terutama di tengah tantangan makroekonomi dan perlambatan penerimaan negara yang terjadi saat ini. Menanggapi hal tersebut, DPR RI melalui Komisi XI perlu mendorong Kemenkeu dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk dapat memfokuskan pengalokasian anggaran terhadap program-program yang memiliki daya ungkit dan memberikan efek berganda di masyarakat. Selanjutnya, Komisi XI DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi dan kerja sama dengan pihak swasta dalam membantu pembangunan. Terakhir, Komisi XI DPR RI perlu memastikan Kemenkeu untuk membuat perencanaan efisiensi anggaran secara matang, sehingga tidak menghambat motor penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Sumber

bloombergtechnoz.com, 11 Agustus 2025;
cnnindonesia.com, 8 Agustus 2025;
kemenkeu.go.id, 24 Juli 2025;
kontan.co.id, 13 Agustus 2025;
Koran Jakarta, 17 Juli 2025; dan
tempo.co, 15 Agustus 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah.
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making